

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DI DESA BANGAI KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH:

NOVA RATNA SIKIN RAMBE

148520032



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DI DESA BANGAI KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



OLEH:

NOVA RATNA SIKIN RAMBE

148520032

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOVA RATNA SIKIN RAMBE

NPM : 148520032

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA

BANGAI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN

LABUHAN BATU SELATAN

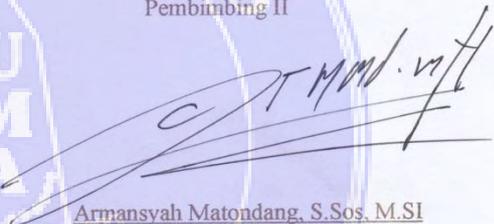
Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Indra Muda, M.AP


Armansyah Matondang, S.Sos, M.SI

Dekan Fakultas Isipol

Ka. Prodi




Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA


Dra. Hj. Rsmala Dewi, MPd

Tanggal Lulus : 31 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini yang saya susun untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai norma, akidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 31 Mei 2018

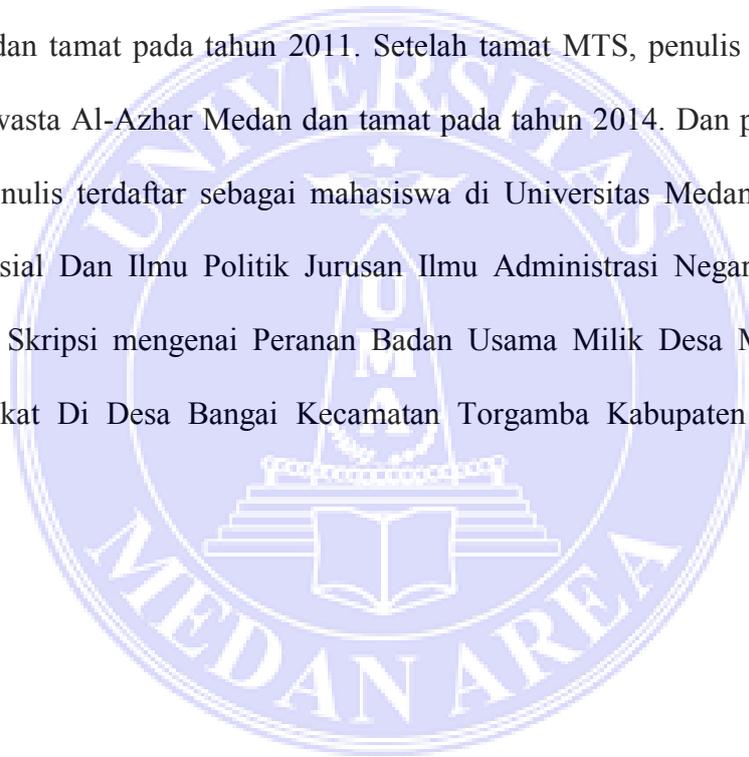



Nova Ratna Sikin Rambe

148520032

RIWAYAT HIDUP

Nova Ratna Sikin Rambe, lahir pada tanggal 26 Agustus 1996, di Desa Mananti Kabupaten Padang Lawas Utara. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan H. Amir Husin Rambe dan HJ. Rosmaini Hasibuan. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 101800 Ujung Batu Jae pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTS di Pondok Pesantren Ahmadul Jariah Kota Pinang dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat MTS, penulis melanjutkan ke SMA Swasta Al-Azhar Medan dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan berhasil menulis Skripsi mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Memberdayakan Masyarakat Di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

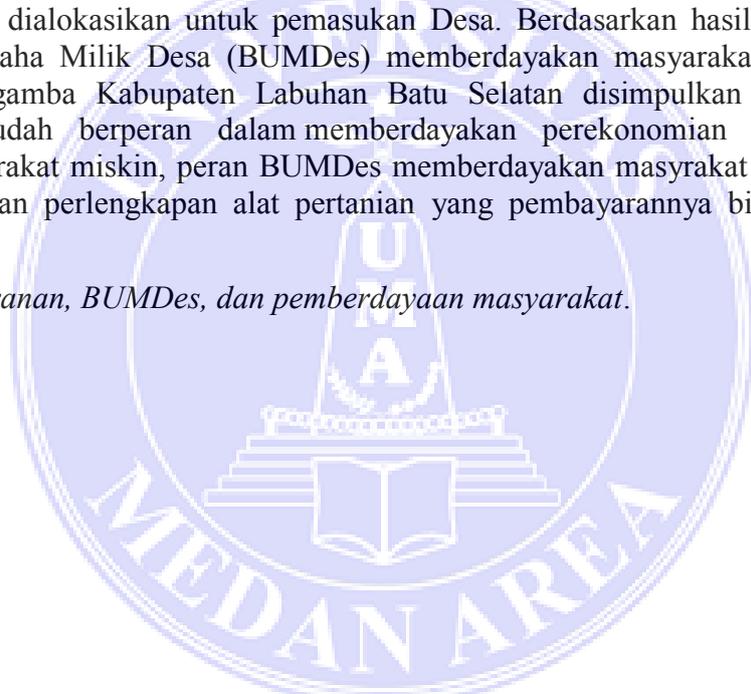


ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Dengan adanya UU nomor 6 Pasal 87 ayat 1 tahun 2014 menjelaskan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masyarakat berharap BUMDes mampu menggerakkan perekonomian Desa. Aset ekonomi yang ada di Desa harus di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa melalui program BUMDes. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Peneliti mendapatkan beberapa data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Kontribusi BUMDes terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Desa, dimana keuntungan bersih BUMDes dialokasikan untuk pemasukan Desa. Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberdayakan masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan disimpulkan bahwa BUMDes Bangai Jaya sudah berperan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Desa khususnya masyarakat miskin, peran BUMDes memberdayakan masyarakat yaitu lewat usaha yang menyediakan perlengkapan alat pertanian yang pembayarannya bisa dibayar secara bertahap.

Kata Kunci: *peranan, BUMDes, dan pemberdayaan masyarakat.*

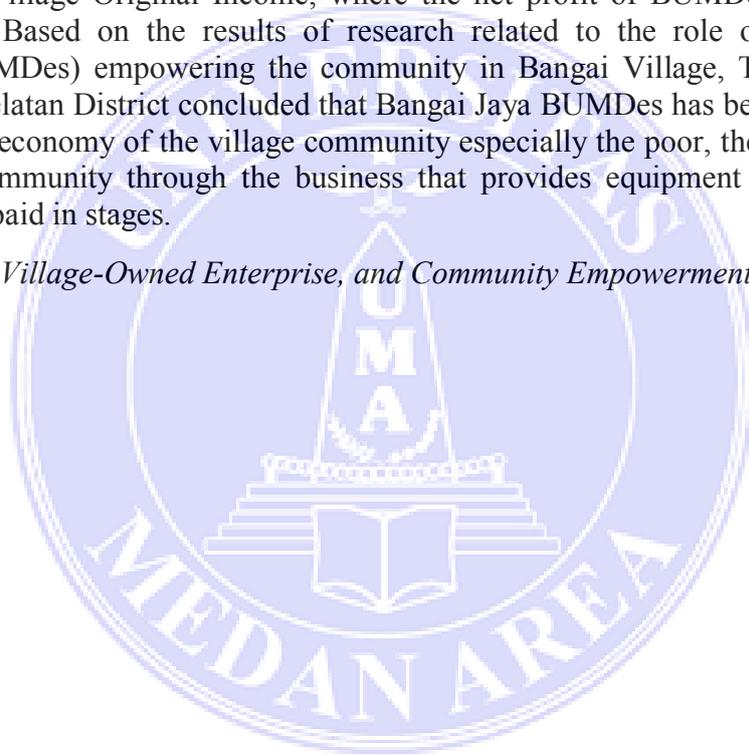


ABSTRAC

Village Owned Enterprises is a village business entity managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy formed based on the needs and potential of the village. With the existence of Act No. 6 of Article 87 paragraph 1 of 2014 explains, the Village can establish a Village Owned Enterprises. The community hopes BUMDes can drive the village economy. Economic assets in the village must be fully managed by the villagers through the BUMDes program. In this research using qualitative descriptive method. And the method of data collection is done by observation, interview and documentation. After the data collected and then analyzed, in testing the validity of data, this study using data triangulation techniques.

Researchers get some data from the results of observations and interviews conducted in Bangai Village District Torgamba Labuhan Batu Selatan District. The existence of BUMDes is undeniable to bring economic and social change. BUMDes contribution mainly in the form of Village Original Income, where the net profit of BUMDes is allocated for village income. Based on the results of research related to the role of Village Owned Enterprises (BUMDes) empowering the community in Bangai Village, Torgamba District, Labuhan Batu Selatan District concluded that Bangai Jaya BUMDes has been instrumental in empowering the economy of the village community especially the poor, the role of BUMDes empower the community through the business that provides equipment agriculture where payment can be paid in stages.

Keyword: *Role, Village-Owned Enterprise, and Community Empowerment.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan yang berarti. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiah sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Memberdayakan Masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba”**.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis, adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai memenuhi tugas akhir untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar sarjana. Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut mendukung dan membimbing penulis, kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya Ibunda Rosmaini, Ayahanda Amir Husin Rambe, Adik Saya Daulat Samano Rambe, Nora Patima Rambe dan seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat serta motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.

3. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku ketua sidang penulis.
4. Bapak Drs. Indra Muda, M.AP selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.SI selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Nasrullah Hidayat, S.Pd, M.SC selaku sekretaris pembimbing.
7. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi M.Pd selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Seluruh Staff dan Dosen yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis, selama menimba ilmu di Universitas Medan Area.
9. Sahabat seperjuangan Administrasi Negara 2014 terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
10. Bapak dan ibu di kantor BUMDes Desa Bangai yang telah memberikan saya izin untuk meneliti.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah dibuat masih jauh dari kesalahan dan kesempurnaan, maka dari itu penulis sampaikan mohon maaf semoga bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 24 Mei 2018

Penulis

Nova Ratna Sikin Rambe

NPM: 148520032

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pengertian Peran.....	4
2.2 Desa.....	6
2.3 Badan Usaha Milik Desa.....	9
2.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	14
2.5 Pengembangan Masyarakat.....	17
2.6 Sumber Daya Manusia	19
2.7 Manajemen SDA.....	21
2.8 Kerangka Pemikiran	25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis , Sifat , Lokasi Dan Waktu.....	27
3.1.1 Jenis Penelitian	27
3.1.2 Sifat Penelitian.....	27
3.1.3 Lokasi Penelitian	28
3.1.4 Waktu Penelitian.....	28
3.2 Metode Pengumpulan Data	28
3.3 Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum Desa Bangai	32
4.1.2 Profil BUMDes Bangai Jaya	36
4.1.3 Struktur Organisasi BUMDes.....	38
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	40
4.1.5 Visi dan Misi BUMDes	42
4.1.6 Kewajiban Dan Hak Badan Pengelola	43
4.1.7 Kewajiban Dan Hak Pengawas.....	44
4.1.8 Pembiayaan Dana Operasional.....	44
4.1.9 Permodalan.....	45
4.1.10 Kegiatan Usaha	46

4.1.11 Jenis Usaha BUMDes dan Pembagiannya	47
4.2 Pembahasan.....	59
4.2.1 Peran BUMDes Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	59
4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program BUMDes	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran.....	67
Daftar Pustaka	68

DAFTAR BAGAN

Nomor		Halaman
1.	Bagan Kerangka Pemikiran	26
2.	Bagan Struktur Organisasi BUMDes	39



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Tabel Nama Dusun Desa Bangai.....	34
2.	Tabel Komposisi Penduduk Menurut Usia.....	35
3.	Tabel Sumber Penghasilan Utama Penduduk.....	36
4.	Tabel Potensi Desa Bangai.....	38
5.	Tabel Permasalahan dan Solusi BUMDes.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemakmuran suatu Desa harus di dorong dengan adanya peningkatan perekonomian Desa, melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Pasal 87 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 menjelaskan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, masyarakat berharap BUMDes mampu menggerakkan perekonomian Desa. Aset ekonomi yang ada di Desa harus di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa melalui program BUMDes. Pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama di jalankan pemerintah melalui berbagai cara dan program agar tercapainya tujuan, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil yang sesuai dengan perkiraan. Banyak faktor yang menghambat proses program tersebut antara lain salah satunya intervensi pemerintah terlalu besar, dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah kepada Desa, akibatnya dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan.

Desa Bangai merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bangai telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes Desa Bangai diprakarsai oleh masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan pemerintah Provinsi Daerah Sumatera Utara.

Namun pada kenyataannya kondisi pengelolaan BUMDes di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih kurang efektif, dikarenakan kurangnya dana yang diberikan pemerintah dan kurangnya tenaga kerja untuk mengelola BUMDes sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan BUMDes kurang maksimal.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk memilih judul ” **Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Memberdayakan Masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba**” Selain Itu Juga Penulis Merasa Pentingnya Desa Sebagai Pilar Perekonomian bangsa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah BUMDes sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaa program BUMDes di Desa Bangai Kecamatan Torgamaba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Bangai Kecamatan Torgamba.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas maka manfaat berdasarkan dari hasil penelitian. Dalam hal ini manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan input positif bagi pelaksanaan kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memberdayakan masyarakat Desa, agar menjadikan pendorong peningkatan kinerja suatu lembaga dalam mencapai tujuannya.
3. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang ilmu administrasi public khususnya yang berkaitan dengan peranan BUMDes memberdayakan masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut " Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, atau organisasi maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki organisasi yang berkedudukan didalam masyarakat.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Soekanto (1982: 237) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Ralph linton dalam Soekanto (1982: 237) mengatakan Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lainnya begitu juga sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Ely Chinoy dalam Soekanto (1982: 238) Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekitarnya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam bergaul kepada masyarakat. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat.

Menurut Levinson dalam Soekanto (1982: 238) menyebutkan peranan mencakupi tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu oleh dimasyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat. Sedangkan menjalankan setiap

lembaga selalu dilakukan oleh pengurus. Dan setiap-tiap orang mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok masyarakatnya.

1.2 Desa

Dalam susunan suatu Negara Desa mendapat kedudukan struktur pemerintahan paling bawah yang di huni sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhurnya dan sebagai pusat budaya yang menjadi identitas dan ciri khas sebuah Negara, melalui adat istiadat Desa tersebutlah Negara bisa dikenal dengan mengekspresikan kemampuan dalam kepentingan bersama melalui komunitasnya dan dikelola dengan baik.

Menurut Sunardjo dalam Wasistiono (2006: 9) berpendapat bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang dasar tahun 1945 Pasal 18 menyatakan “pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa”.

Desa mempunyai lembaga musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan. Widjaja (2004: 24) Lembaga musyawarah Desa

merupakan wadah permusyawaratan atau pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakata dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa telah memberikan pengaruh besar kepada Desa dalam menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan budaya lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang- Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah Desa adat atau dengan nama lain, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur pemerintahan. Undang-undang tersebut juga memberikan kekuasaan yang besar kepada Desa untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Potensi Desa, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.

Kemakmuran suatu Desa dari sisi ekonomi menjelaskan bahwa kemampuan Desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi. Desa menjadi elemen yang paling utama, juga paling prioritas dalam skema kesejahteraan masyarakat.

Asal Mula Terbentuknya Desa, mulanya dihuni orang seketurunan, Mereka memiliki nenek moyang sama, yaitu para cikal bakal pendiri permukiman tersebut. Jika Desa sudah penuh, masalah-masalah ekonomi bermunculan. Beberapa keluarga keluarga keluar, mendirikan permukiman baru dengan cara membuka hutan. Tindakan ini disebut tetruka, Di Tapanuli pembukaan Desa baru

menurut Marbun sebagian karena kelompok baru ingin mencapai hak dan kewajiban sebagai raja adat atau tanah Desa tak memadai lagi untuk kehidupan penghuninya. Desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki 3 hal ;

- a. Daerah/ rangkai/ wilayah, yaitu tanah-tanah pekarangan dan pertanian beserta penggunaannya, termasuk aspek lokasi, luas, batas, yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. Penduduk/ darah/ keturunan, meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian.
- c. Adat/ warah/ ajaran, yaitu ajaran tentang tata hidup, tata pergaulan, dan ikatan-ikatan sebagai warga Desa. Tata kehidupan ini terkait usaha penduduk terkait mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Desa memiliki setting geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ada Desa yang dikarunia alam yang kaya, namun semangat membangun, keterampilan dan pengetahuan masyarakat serba kurang, sehingga tidak maju. Ada pula Desa yang sumber alamnya terbatas, Tetapi ekonominya maju, berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam. Sehubungan dengan ini, ada 4 unsur geografis yang turut menentukan persebaran Desa, yaitu : lokasi, iklim, tanah dan air.

- a. Lokasi, menyangkut letak fisiografis, misalnya ; jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, rawa, pegunungan, pantai, kota, dan sebagainya. Yang mempengaruhi ekonomi Desa, kemajuan budaya, pendidikan. Contohnya, persebaran Desa-desa di wilayah kecamatan Batu, Malang. Desa-desa ini menempati wilayah vulkanis yang tersebar di sekitar puncak-puncak gunung. Batas alam hampir berhimpit dengan batas administrasi. Kondisi fisiografis

(topografi, iklim, vegetasi) cocok untuk agrowisata. Sungai Brantas di hulu memiliki banyak cabang sehingga baik untuk pertanian sayur, bunga dan budi daya pekarangan.

- b. Iklim Desa (tipe iklim), tergantung letak topografi Desa dari atas permukaan air laut. Kaliurang dan Kopeng menjadi kota peristirahatan, lengkap dengan fasilitas rekreasi, perhotelan, perwarungan, perdagangan sayur dan bunga-bunga. Di ketinggian tersebut, tak ada sawah atau pun pohon kelapa yang tumbuh.
- c. Tanah, misalnya tanah berkapur, berpasir, berlempung, bertanah liat, dsb, mempengaruhi keberhasilan pertanian. Tebu, tembakau, karet, coklat, teh, kopi, dan sebagainya , dibudidayakan menjadi perkebunan dengan modal teknologi dan perencanaan yang tepat.

1.3 Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Menurut buku panduan BUMDes dalam penelitian Singgih (2015: 31) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha milik Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Secara umum BUMDES dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Desa serta penguatan perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDES berdasarkan pada prinsip *kooperatif*, *partisipatif*, *emansipasif*, *transfaransi*, *akuntabel* dan *sustainbel* Menurut buku panduan BUMDes dalam penelitian Singgih (2015: 31). BUMDES didirikan berdasarkan Perundang-Undang BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut untuk membantu Desa meningkatkan pendapatan asli Desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari Desa dan masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDES sebagai sumber pendapatan Desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usaha dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga.

Tujuan Dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan perundang-perundangan no. 6 tahun 2014 yaitu :

1. Tujuan pendirian BUMDes antara lain:
 - a. Meningkatkan perekonomian Desa.
 - b. Meningkatkan pendapatan asli Desa
 - c. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
2. Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi Desa dan mengurangi tingkat pengangguran
- d. Membantu pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesanya
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya; pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat Desa

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sebagai sumber pendapatan asli Desa dan membawa manfaat tersendiri bagi Desa yang mendirikannya. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan Perundang-Undangan no 6 tahun 2014 tentang Desa, secara rinci tentang kedua landasan hkum BUMDes adalah:

1. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Desa pasal 213
 - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa

- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan
 - c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan Perundang-Undangan.
2. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 87
 - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
 - b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
 - c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 88
 - a. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa.
 - b. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 89 Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan usaha.
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.
5. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 90 Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:
 - a. Memberikan hibah atau akses permodalan .

- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar, dan
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam didesa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, PEMKAB, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan , suku dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi Desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran Desa yang semakin besar.

Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PAD yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi Desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan atau menjalin kedekatan disemua lapisan masyarakat Desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat banyak pakar yang membahas hal ini salah satunya adalah Payne dalam Isbandi (2008: 77) mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Menurut Chambers (1994: 22) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum Nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Menurut Sumodiningrat (1999: 66) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.

Shardlow dalam Isbandi (2008: 78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka, shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan biestek yang dikenal dibidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama „*self-determination*“.

Tujuan pemberdayaan ada beberapa bidang. Yaitu bidang ekonomi, pendidikan dan sosial. bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan ataupun dibidang sosial. Misalnya saja, tujuan pemberdayaan dibidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relative stabil. Pemberdayaan Pada bidang pendidikan adalah agar kelompok dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sedangkan

tujuan pemberdayaan dalam bidang sosial ialah agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.

Pemberdayaan ini bisa bervariasi berdasarkan tujuan pembangunan tersebut sehingga bentuk pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan pemberdayaan dibidang budaya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Untuk melihat apa yang dimaksud dengan pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*).

Menurut Hogan (2003: 13) yang mengutip dari pandangan Rotter dalam Isbandi (2008: 84) pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.

Menurut Hogan dalam Isbandi (2008: 85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment*).
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*)
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*) dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan (*develop and implement action plans*).

2.5 Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah suatu kegiatan mengembangkan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk memperbaiki lingkungan sekitarnya. Dan menumbuhkan sikap saling peduli kepada masyarakat lainnya, agar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Zubaedi (2014: 4) Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.

FCDL dalam Zubaedi (2014: 5) Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat ini adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.

Menurut Zubaedi (2014: 4) Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak

memiliki sumberdaya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol saran produksi untuk mereka pada masing-masing orang.

Dengan demikian menurut Edi Suharto dalam Zubaedi (2014: 5) pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang memengaruhi kehidupannya. pengembangan masyarakat adalah *"the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions."* Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.

Payne dalam Zubaedi (2014: 5) Kegiatan pengembangan masyarakat upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengembangan masyarakat sering kali di implementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan. *Pertama*, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat mempunyai daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya, *kedua*, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab.

Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya

dan partisipasi. Pengembangan masyarakat meliputi usaha memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas diantara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata.

2.6 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut Sutrisno (2014: 3) Semula SDM merupakan terjemahan dari "*human resources*", namun adapula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan "*manpower*" (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Werther dan Davis dalam Sutrisno (2014: 4), menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah "pegawai yang siap, mampu, siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi". Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia

adalah perlakuan kontribusi terhadap yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Sumber Daya Manusia berkualitas tinggi. menurut Ndraha dalam Sutrisno (2014: 4) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai kompratif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *nintelligence, creativity dan imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan air, tenaga otot, dan sebagainya.

Kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (*power*). Bagi perusahaan, ada tiga sumber daya strategis lain yang mutlak harus mereka miliki untuk dapat menjadi sebuah perusahaan unggul.

Tiga sumber daya kritis tersebut menurut Ruki dalam Sutrisno (2014: 5) adalah:

1. *Financial resource*, yaitu sumber daya berbentuk dana/ modal *financial* yang dimiliki.
2. *Human resource*, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani.
3. *Informational resource*, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis ataupun taktis.

Dari ketiga *resources* yang bersifat strategis tersebut, hamper semua pimpinan perusahaan besar dan modern sekarang mengakui bahwa paling sulit diperoleh dan dikelola adalah *human resource*, yaitu ”sumber daya manusia/modal insani” yang mempunyai kualitas yang pas dengan yang diinginkan oleh perusahaan

2.7 Manajemen Sumber Daya Manusia

Ber macam-macam pendapat tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, antara lain adanya yang menciptakan *human resources*, ada yang mengartikan sebagai *man power management* serta ada yang menyetarakan dengan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Akan tetapi, pada manajemen sumber daya manusia yang mungkin tepat adalah *human resources management* (manajemen sumber daya manusia). Dengan demikian secara sederhana pengertian manajemen sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia.

Menurut Simamora dalam Sutrisno (2014: 5), manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberi balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Dessler dalam Sutrisno (2014: 5), manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seseorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Fokus MSDM terletak pada upaya mengelola SDM didalam dinamika interaksi antara organisasi dan pekerja yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Menurut Stoner dalam Sutrisno (2014: 6), MSDM meliputi penggunaan SDM secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Jadi, MSDM dapat juga merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pengguna SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.

Manajemen sumber daya manusia mempunyai tugas untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Menurut Umar dalam Edy Sutrisno (2014: 7), dalam tugasnya manajemen sumber daya manusia dapat dikelompokkan atas tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
2. Fungsi operasional: pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan kerja.
3. Fungsi ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen Sumber Daya Manusia sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Cushway Berkata dalam Irianto dalam buku Sutrisno (2014: 7) tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi:

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerjaan yang lalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal.
2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya.
3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.
4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer line mencapai tujuannya.
5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dan hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.
6. Menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi.
7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM.

Sedangkan menurut Schuler at al dalam Irianto dalam buku Sutrisno (2014: 7) setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Memperbaiki tingkat produktivitas.
2. Memperbaiki kuliat kehidupan kerja.
3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal.

Organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan, maka sumber

daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang.

Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber daya manusia yang paling sentral, Dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Sutrisno (2014: 9) Fungsi manajemen sumber daya manusia dimaksud adalah sebagai:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien, dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi, dalam bentuk bagan organisasi.

3. Pengarahan dan pengadaan

Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai, agar mau kerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu dalam tercapainya tujuan organisasi. Adapun pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapat pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan Kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengembangan

Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

6. Kompensasi

Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan.

7. Pengintegrasian

Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

8. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2014: 60) Mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.

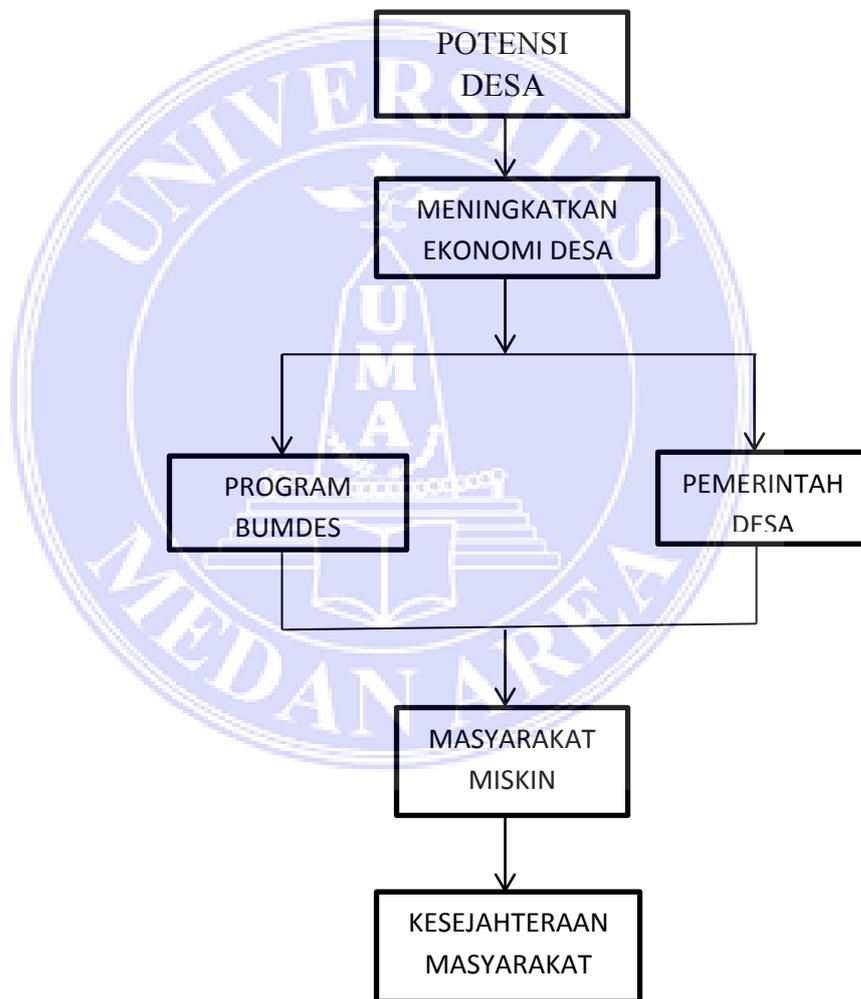
Kerangka pemikiran ini merupakan alur pemikiran dari peneliti sendiri atau juga mengambil dari suatu teori, kerangka pemikiran ini juga merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi permasalahan yang ada di perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa Memberdayakan Masyarakat Di Desa Bangai. Dalam upaya menyelesaikan rumusan masalah penelitian ini mengambil teori peranan dari Soekanto (1982: 237) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk berdasarkan potensi Desa, sehingga dengan adanya BUMDes diharapkan mampu memperbaiki tingkat perekonomian Desa dan pada akhirnya membawa dampak positif berupa

kesejahteraan masyarakat lebih baik. BUMDes diharapkan menjadi lembaga ekonomi yang dapat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri agar timbul suatu kemakmuran dan ketentraman pada Desa.

Dari analisis diatas , penulis membuat Bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada suatu peranan BUMDes dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas atau organisasi.

Menurut Bogdan dan Moleong (2002: 3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

1.1.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah Deskriptif. Menurut Sugiyono (2006: 11) metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

1.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang beralamat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

1.1.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dimulai dari bulan Februari 2018 sampai bulan April 2018.

1.2 Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

2. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014: 226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh

melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering bantuan berbagai alat yang sangat canggih agar observasi dapat dilakukan dengan jelas.

Dalam melakukan observasi peneliti terlebih dahulu meninjau lokasi ataupun tempat yang ingin di teliti yaitu Kantor Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

3. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014: 231) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti , ataupun peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

- a. Informan kunci (key informan), yaitu orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala Desa Bangai.
- b. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah ketua atau pengurus BUMDes Desa Bangai.
- c. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bangai itu sendiri.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.

5. Triangulasi

Sugiyono (2014: 241) Triangulasi data dalam kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono 2012: 244)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut (miles dan Huberman dalam Sugiyono 2014: 246) meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana yang dianggap yang menjadi pusat penelitian dilapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang sudah disederhanakan.

4. Pengambil Keputusan Atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi yang terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: pt rajagrafindo persada.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*. Yogyakarta: gava media.
- Chambers, Robert. 1994. *Participatory rural appraisal (PRA): memahami desa secara partisipatif Oxfam*: yayasan mitra tani
- Moleong, lexy j. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: cv rajawali pers.
- Sumodiningrat. 1999. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi kedua. Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Sutrisno, Edy. 2009. *manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: prenada media group.
- Sugiyono. 2006. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- . 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- . 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *prospek pengembangan desa*. Bandung: fokus media.
- Widjaja, Haw. 2004. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh*. Jakarta: pt rajagrafindo persada.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan masyarakat*. Jakarta: fajar interpretama mandiri.

Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 1 Tentang Desa Dapat

Mendirikan Badan Usaha Milik Desa Yang Disebut Bum Desa.

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa Pasal 213

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa

Jurnal:

Atmojo,S.T.dan hendrijanto.K. 2015. *Peran badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa morejo*. Kesejahteraan sosial unej.1(1):1-14

Ramadana,C.B dan ribawanto,H. dan suwondo. *Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa*.administrasi public. 1(6):1068-1076.

Internet:

Sumber.[Http://Bapenas.Jatiprov.Go.Id/Index.Php/Program/Kegiatan-Ppm/278-Sumber.Pengembangan-Bumdes](http://Bapenas.Jatiprov.Go.Id/Index.Php/Program/Kegiatan-Ppm/278-Sumber.Pengembangan-Bumdes)(Diakses 02 desember 2017, pukul 15:17 WIB)

Sumber<https://www.google.co.id/amp/s/anisavitri.wordpress.com/2009/12/17/desa-definisi-asal-mula-bentuk-pola-ciri-romantikanya/amp/>(diakses 17 desember 2017, pukul 19:00)

Sumber<http://www.landasan-teori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-Cmenurut.html?m=1>

DOKUMENTASI

1. Foto Bersama Pengurus BUMDes Banggai Jaya di Desa Banggai



2. Foto Bersama Bapak Kepala Desa Bangai di Kantor Kepala Desa



3. Foto Bersama Bapak Fadli Selaku Warga Desa Bangai



4. Kantor BUMDeses Bangai Jaya Di Desa Bangai

